

## Pengaruh Derajat Kontribusi PAD dan Rasio Efisiensi Belanja Modal Terhadap Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten)

Dewi Nurjana<sup>1</sup>; Veta Lidya Delimah Pasaribu<sup>2</sup>

<sup>1-2)</sup> Universitas Pamulang, [dewijana93@gmail.com](mailto:dewijana93@gmail.com), [veta01189@unpam.ac.id](mailto:veta01189@unpam.ac.id)

### ARTICLES INFORMATION

### ABSTRACT

**JURNAL SEKURITAS**  
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)

Vol.6, No.2, Januari 2023  
Halaman : 109 – 121

© LPPM & Prodi Manajemen  
UNIVERSITAS PAMULANG

ISSN (online) : 2581-2777  
ISSN (print) : 2581-2696

#### Keyword :

Derajat kontribusi PAD; dan rasio efisiensi belanjaa modal; rasio kemandiriann keuangan

#### JEL. Classification:

C33, G21, G24, N15, N25

#### Permalink:

DOI: [10.32493/skt.v6i1.23166](https://doi.org/10.32493/skt.v6i1.23166)

#### Article info :

Received : November 2022  
Revised : Desember 2022  
Accepted : Januari 2023

#### Licenses :



<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

#### Contact :

PRODI MANAJEMEN UNPAM  
JL.Surya Kencana No.1  
Pamulang Tangsel– Banten  
Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491  
Email : [sekuritas@unpam.ac.id](mailto:sekuritas@unpam.ac.id)

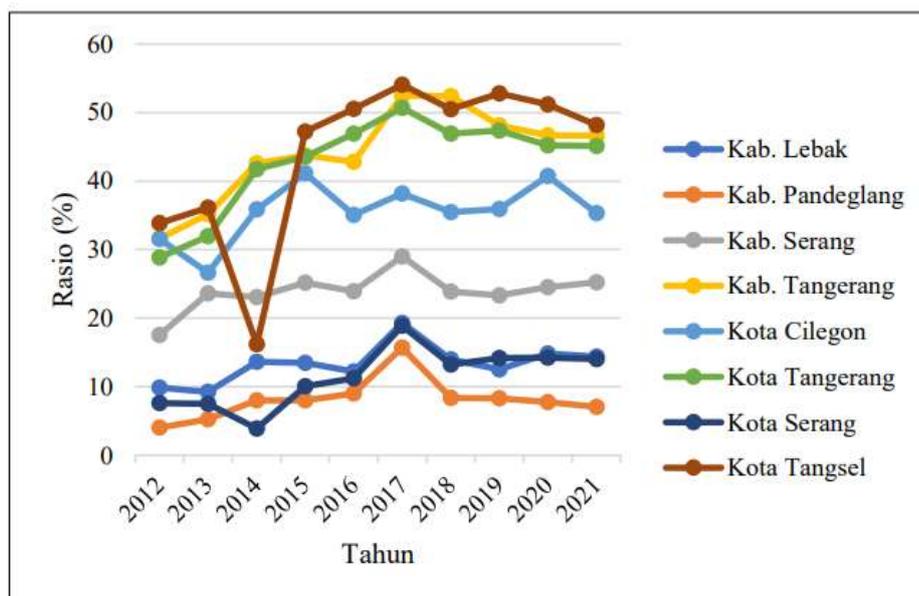
Abstrak. Riset ini memiliki tujuan untuk mencari tahu pengaruh derajat kontribusi PAD dan rasio efisiensi belanja modal terhadap rasio kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kab/Kota di Provinsi Banten Tahun 2012-2021. Riset ini memakai metode kuantitatif dengan data sekunder yang berbentuk laporan keuangan. Pengambilan sampel menggunakan metode sensus (sampel jenuh). Analisis regresi data panel dipilih sebagai teknik analisis data pada riset ini. Hasil riset secara parsial membuktikan bahwa derajat kontribusi PAD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap rasio kemandirian Keuangan Daerah. Secara simultan hasil riset membuktikan bahwa derajat kontribusi PAD dan rasio efisiensi belanja modal memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah

**Abstract.** This research aims to find out the effect of the degree of pad contribution and the ratio of capital expenditure efficiency to the ratio of regional financial independence in the government of districts / citiesa in Banten Province in 2012-2021. This research uses quantitative methods and uses sekunder data in the form of reports of keuangan. Sampling using the census method (saturated samples). Panel data regression analysis was chosen as a data analysis technique in this study. The results of the research partially prove that the degree of pad contribution has a significant positive influence on the ratio of regional financial independence, the efficiency ratio of capital expenditure has a positive and significant influence on the ratio of regional financial independence. Simultaneously, the results of the study proved that the degree of PAD contribution and the capital expenditure efficiency ratio had a significant influence on the regional financial independence ratio of 89.05% the regional financial independence ratio was influenced by the degree of PAD contribution and the capital expenditure efficiency ratio, and the remaining 10.05% was influenced by other variables that were not used in the research

## A. PENDAHULUAN

Pemerintah secara fungsional merupakan sistem, struktur dan organisasi yang bertujuan untuk mengelola bangsa dan negara. Keuangan dan anggaran merupakan bagian yang perlu di atur oleh pemerintah. Sejak undang-undang pemerintahan daerah (UU No. 32 Tahun 2004) dan undang-undang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UU No. 33 Tahun 2004) banyak perubahan yang terjadi pada tata kelola pemerintahan di Indonesia. Namun permasalahan yang masih terjadi pada keuangan daerah yaitu, tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk DAU (dana alokasi umum) dan DAK (dana alokasi khusus) masih tinggi, sedangkan kemampuan pemerintah daerah untuk memaksimalkan pemungutan atas sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) masih rendah (Malau & Simarmata, 2020). PAD menjadi pendapatan utama yang diperlukan oleh pemerintah daerah agar dapat mengurangi ketergantungan fiskal. Menurut Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan Republik Indonesia) ketergantungan daerah terhadap transfer keuangan daerah dan dana desa (TKDD) masih tinggi. Rata-rata, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bergantung pada TKDD sebesar 80,1%. Sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berkisar 12,87% (Nugraha, 2019).

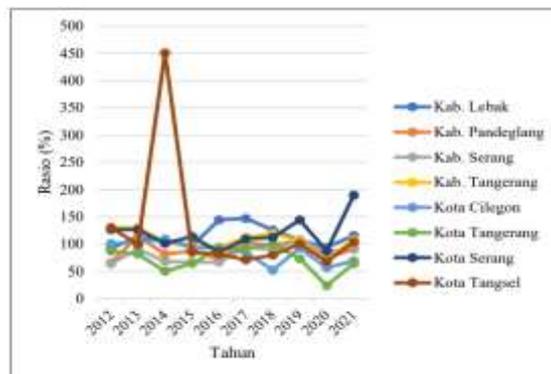
Provinsi Banten termasuk provinsi baru di Negara Indonesia yang dibentuk berlandaskan UU No. 23 Tahun 2000 pada 17 Oktober 2000. Provinsi Banten merupakan ekspansi dari Provinsi Jawa Barat. Provinsi banten terbagi menjadi 8 wilayah kab/kota yaitu Kab. Lebak, Kab. Pandeglang, Kab. Serang dan Kab. Tangerang, serta Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Setiap wilayah kab/kota mempunyai sumber daya serta kegiatan ekonomi yang tidak sama, sehingga derajat kontribusi PADnya juga berbeda-beda . PAD ialah penghasilan murni yang didapatkan dari wilayahnya sendiri. PAD berperan menjadi tolak ukur atas pencapaian dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pada pemerintah di Provinsi Banten derajat kontribusi PAD masih rendah rata-rata dibawah 30%. Pada gambar 1 menyajikan grafik pertumbuhan derajat Kontribusi PAD di Provinsi Banten periode 2012-2021.



Sumber: Hasil pengolahan data oleh penulis (2022)

**Gambar 1 Grafik Pertumbuhan Derajat Kontribusi PAD Kab/Kota di Provinsi Banten Periode 2012-2021**

Belanja modal yaitu pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk pembelian aktiva tetap. Belanja modal dimaksudkan untuk pengadaan fasilitas publik yang manfaatnya dapat di nikmati oleh masyarakat. Pengeluaran belanja modal dialokasikan oleh pemerintah daerah salah satunya untuk tujuan pembangunan infrastruktur pada sektor transportasi, kesehatan, pendidikan dan sektor-sektor strategis lainnya (Patarai, 2017). Dengan adanya infrastruktur yang memadai diharapkan kegiatan di berbagai sektor dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta produktivitas masyarakat semakin meningkat sehingga pada akhirnya dapat terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Namun permasalahannya pada realisasi belanja modal sangat rawan terjadi kebocoran, inefisiensi dan pemborosan, sehingga analisis terhadap belanja modal perlu dilakukan untuk menilai apakah anggaran APBD yang telah digunakan pemerintah daerah telah sesuai dengan *value for money*. Realisasi belanja modal di kab/kota Provinsi Banten dapat dikategorikan tinggi bahkan pada periode anggaran 2012-2021 setiap tahun terdapat realisasi belanja modal yang melebihi pagu anggaran salah satunya terjadi pada kota Tangerang selatan tahun 2014 realisasi belanja modalnya mencapai 450,78%. Pada gambar 2 menyajikan grafik pertumbuhan rasio efisiensi belanja modal di Provinsi Banten periode 2012-2021.



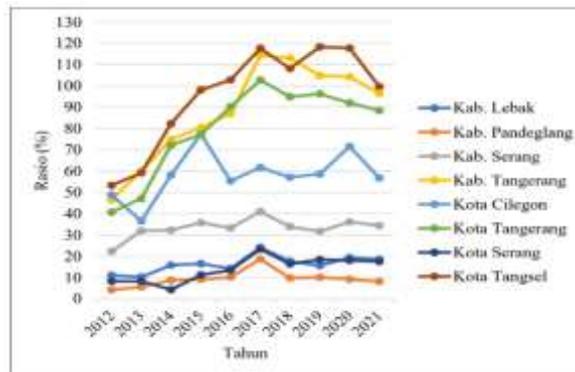
Sumber: Hasil pengolahan data oleh penulis (2022)

**Gambar 2 Grafik Pertumbuhan Rasio Efisiensi Belanja Modal Kab/Kota di Provinsi Banten Tahun 2012-2021**

Analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Banten perlu dilakukan untuk menilai tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan otonomi fiskal. Keberhasilan dari penerapan otonomi fiskal salah satunya ditunjukkan oleh rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi angka rasio kemandirian keuangan daerah berarti semakin kecil tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun pihak eksternal, dengan demikian tujuan dari otonomi daerah serta desentralisasi fiskal telah terwujud (Mahmudi, 2019). Rasio kemandirian keuangan daerah di Kab/Kota Provinsi Banten pada periode 2012-2021 menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara wilayah tangerang raya (Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang) dengan wilayah lainnya. Rasio kemandirian keuangan di wilayah tangerang raya masuk kedalam pola hubungan partisipatif sampai delegatif (kemampuan keuangannya sedang sampai dengan tinggi) sedangkan pada daerah lainnya masih konsultif bahkan inststruktif (kemampuan keuangannya rendah bahkan sampai rendah sekali). Rasio kemandirian keuangan daerah di wilayah tangerang raya lebih tinggi dikarenakan wilayah ini merupakan pusat aktifitas ekonomi dan bisnis, diantaranya industri manufaktur, perdagangan dan real estate. Sedangkan yang menyebabkan rasio kemandirian keuangan daerah di wilayah lainnya rendah yaitu karena pada daerah tersebut masih didominasi oleh sektor pertanian dan sektor perkebunan, oleh karena itu PAD yang bisa dihasilkan juga relatif lebih kecil daripada wilayah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan bisnis. Rasio kemandirian keuangan daerah pada kota serang yang merupakan Ibukota Provinsi Banten belum menunjukkan sebagai pusat pemerintahan seperti pada umumnya Ibu kota provinsi di daerah lain (Riyanti



et al., 2021). Pada gambar 3 menyajikan grafik pertumbuhan rasio kemandirian keuangan daerah di provinsi banten periode 2012-2021.



Sumber: Hasil pengolahan data oleh penulis (2022)

**Gambar 3 Grafik Pertumbuhan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kab/Kota di Provinsi Banten Tahun 2012-2021**

Dari data yang disajikan pada gambar 3, diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah di Provinsi Banten mengalami fluktuatif. Rasio tertinggi adalah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2017 sebesar 118,36% dan rasio terendah adalah Kabupaten Pandeglang pada tahun 2012 sebesar 4,18%.

Riset ini bertujuan untuk mencari tahu pengaruh derajat kontribusi PAD dan rasio efisiensi belanja modal secara parsial dan simultan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah pada Kab/Kota di Provinsi Banten Tahun 2012-2021 dengan rumusan masalah yang dapat dibuat berdasarkan uraian dari latar belakang diatas yaitu, apakah derajat kontribusi PAD secara parsial memiliki pengaruh terhadap rasio kemandirian keuangan daerah, apakah rasio efisiensi belanja modal secara parsial memiliki pengaruh terhadap rasio kemandirian keuangan daerah, serta apakah derajat kontribusi PAD dan rasio efisiensi belanja modal secara simultan memiliki pengaruh terhadap rasio kemandirian keuangan daerah.

## B. KAJIAN LITERATUR

### Derajat Kontribusi PAD

Pendapatan asli daerah yaitu penerimaan yang berasal dari wilayahnya sendiri, dan dipungut berdasarkan peraturan daerah (Akhmad, 2019). Pendapatan asli daerah yaitu penerimaan murni daerah dan fungsinya merupakan indikator atas pelaksanaan otonomi daerah (Putra, 2018). Derajat kontribusi PAD atau sering disebut dengan derajat desentralisasi adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi PAD dari total pendapatan daerah, semakin besar angka derajat kontribusi PAD menunjukkan semakin tinggi tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi demikian pula sebaliknya, semakin kecil angka derajat kontribusi PAD maka semakin rendah kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi. rasio ini menghitung perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah (Mahmudi, 2019). Derajat kontribusi PAD dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Derajat kontribusi PAD} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

### Rasio Efisiensi Belanja Modal

Belanja modal merupakan sub belanja langsung yang dianggarkan pemerintah daerah dalam APBD untuk mendapatkan aktiva tetap diantaranya tanah, gedung dan bangunan, mesin dan peralatan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya (Putra, 2018). Belanja modal berupa aktiva tetap seperti, gedung pemerintahan, stasiun KAI, halte/terminal bus, gedung olah raga, pelabuhan, jalan dan jembatan, dan lain sebagainya. Gedung pemerintahan manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat akan tetapi diharapkan dapat menunjang efisiensi dan efektifitas kegiatan pemerintah dan pelayanan administrasi publik (Patarai, 2017). Rasio efisiensi belanja modal adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran pada pemerintah. Tidak ada standar baku yang dianggap baik pada rasio ini karena angka yang dihasilkan bersifat relatif, namun pemerintah daerah dianggap telah melakukan efisiensi anggaran apabila rasio efisiensinya kurang dari 100% (Mahmudi, 2019). Rasio efisiensi belanja modal, yaitu rasio yang membandingkan total realisasi belanja modal dengan total anggaran belanja modal, rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisiensi belanja modal} = \frac{\text{Realisasi belanja modal}}{\text{Anggaran belanja modal}} \times 100\%$$

### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menilai tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pendanaan eksternal, baik dari transfer pemerintah pusat maupun hutang daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin kecil ketergantungan daerah pada bantuan keuangan eksternal. Sebaliknya, semakin rendah rasio kemandirian, semakin tergantung daerah tersebut pada bantuan keuangan eksternal (Patarai, 2017). Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung menggunakan informasi dari laporan realisasi anggaran yaitu dengan cara membagi jumlah pendapatan asli daerah dengan total transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pinjaman (Mahmudi, 2019). hubungan situasional dalam pelaksanaan otonomi daerah menurut Paul Harsey dan Kennerth Blancard (Halim, 2002 ; Patarai, 2017) dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1 Pola Hubungan dan Kemampuan Keuangan Daerah**

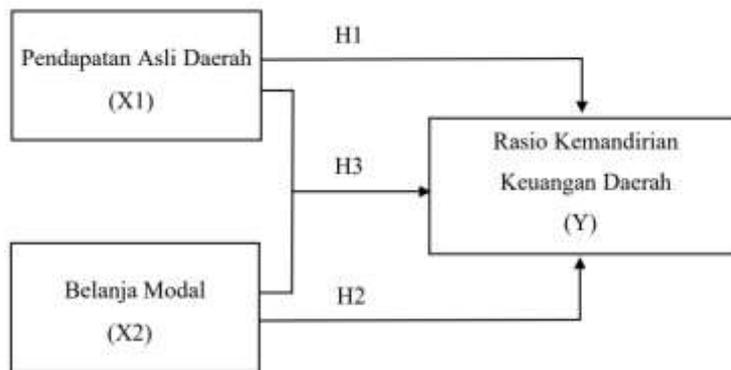
Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegetif

Sumber: Halim, 2002 ; Patarai, 2017

Rumus rasio kemandirian keuangan adalah sebagai berikut:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Transfer pusat + provinsi + pinjaman}} \times 100\%$$

## Kerangka Berpikir



**Gambar 4 Kerangka Berpikir**

### Hipotesis

Dari kerangka berpikir pada gambar 4, dapat dibuat hipotesis pada riset ini, yaitu:

- H1 : Derajat kontribusi PAD secara parsial memiliki pengaruh terhadap rasio kemandirian keuangan daerah
- H2 : Rasio efisiensi belanja modal secara parsial memiliki pengaruh terhadap rasio kemandirian keuangan daerah
- H3 : Derajat kontribusi PAD dan rasio efisiensi belanja modal secara simultan memiliki pengaruh terhadap rasio kemandirian keuangan daerah

## C. METODOLOGI PENELITIAN

Riset ini menggunakan metode riset kuantitatif untuk mencari hubungan asosiatif yang bersifat kausal. Dalam riset ini digunakan data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang dimana data dihimpun dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) kementerian keuangan republik Indonesia, diakses melalui tautan <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>. Populasi pada riset ini yaitu seluruh laporan keuangan pemerintah daerah Kab/Kota di Provinsi Banten periode 2012-2021 dan di dapatkan 80 populasi (8 Pemda x 10 tahun). Sampel untuk riset ini menggunakan laporan realisasi anggaran (LRA), laporan ini dipilih karena LRA merupakan laporan yang pertama kali dikeluarkan oleh pemerintah daerah. pengambilan sampel menggunakan metode sensus (sample jenuh) sehingga dari 80 populasi maka di dapatkan 80 sampel. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan *software* microsoft excel 2019 dan *eviews* 9.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Hasil Uji Statistik Deskriptif

**Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif**

	X1	X2	Y
Mean	27.94800	99.65775	49.37050
Median	25.93000	93.99500	38.58500
Maximum	54.06000	450.7800	118.3600
Minimum	3.890000	23.65000	4.180000
Std. Dev.	15.77877	46.98181	36.39795
Observations	80	80	80

Sumber: Output Eviews 9 (diolah oleh penulis, 2022)



Dilihat dari tabel 2, hasil uji statistik deskriptif variabel derajat kontribusi PAD (X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 27,948000, variabel rasio efisiensi belanja modal (X2) memiliki nilai rata-rata sebesar 99,65775 dan variabel rasio kemandirian keuangan daerah (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 49,37050.

### Analisis Regresi Data Panel

Pada analisis regresi data panel model regresi dapat diestimasi dengan 3 model yaitu model *common effect*, model *fixed effect* dan model *random effect*. peneliti harus memilih model mana yang terbaik untuk digunakan dalam riset. Pemilihan model dapat dilakukan dengan uji chow, uji hauman dan uji *langerange multiplier* (Winarno, 2015).

### Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk memilih model terbaik antara *common effect model* dan *fixed effect model* (Winarno, 2015).

**Tabel 3 Hasil Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.881550	(7,70)	0.0000
Cross-section Chi-square	37.005839	7	0.0000

Sumber: Output Eviews 9 (diolah oleh penulis, 2022)

Dilihat dari tabel 3, hasil uji chow diperoleh nilai probabilitas (*cross-section chi-square*) sebesar 0,0000 lebih kecil dari taraf signifikansi  $\alpha$  5% ( $0,000 < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya model terbaik yang terpilih untuk digunakan dalam riset adalah *fixed effect model*.

### Uji Hausman

Uji hausman dilakukan untuk memilih model terbaik antara *fixed effect model* dan *random effect model* (Winarno, 2015).

**Tabel 4 Hasil Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.111677	2	0.2110

Sumber: *Output Eviews* 9 (diolah oleh penulis, 2022)

Dilihat dari tabel 4, hasil uji hausman diperoleh nilai probabilitas (*cross-section random*) sebesar 0,2110 lebih besar dari taraf signifikansi  $\alpha$  5% ( $0,2110 > 0,05$ ), maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya model terbaik yang terpilih untuk digunakan dalam riset adalah *random effect model*.

### Uji *Lagerange Multiplier*

Uji *Lagrange multiplier* dilakukan untuk menentukan model terbaik antara *random effect model* dengan *common effect model*. Hasil dari uji *lagrange multiplier* merupakan keputusan akhir dari pemilihan model regresi data panel sehingga model



yang terpilih pada uji *lagerange multiplier* akan digunakan untuk menguji hipotesis dalam riset (Winarno, 2015).

**Tabel 5 Hasil Lagrange Multiplier test**

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	25.05899 (0.0000)	0.116852 (0.7325)	25.17584 (0.0000)

Sumber: Output Eviews 9 (diolah oleh penulis, 2022)

Dilihat dari tabel 5, hasil uji *lagerange multiplier* diperoleh nilai *probability Breusch-Pagan* (BP) sebesar 0,0000 lebih kecil dari taraf signifikansi  $\alpha$  5% ( $0,0000 < 0,05$ ),  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya model terbaik yang terpilih untuk digunakan dalam riset adalah *random effect model*.

#### Persamaan Regresi Data Panel

Pada hasil uji pemilihan model regresi data panel dihasilkan bahwa model terbaik untuk digunakan dalam riset adalah *random effect model*, dan pada tabel 5 dapat dilihat hasil pengolahan *random effect model*.

**Tabel 6 Hasil Uji Analisis Regresi Data Panel (*Random Effect Model*)**

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
Total panel (balanced) observations: 80

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-29.31222	4.196323	-6.985217	0.0000
X1	2.393707	0.096022	24.92866	0.0000
X2	0.118233	0.018096	6.533730	0.0000

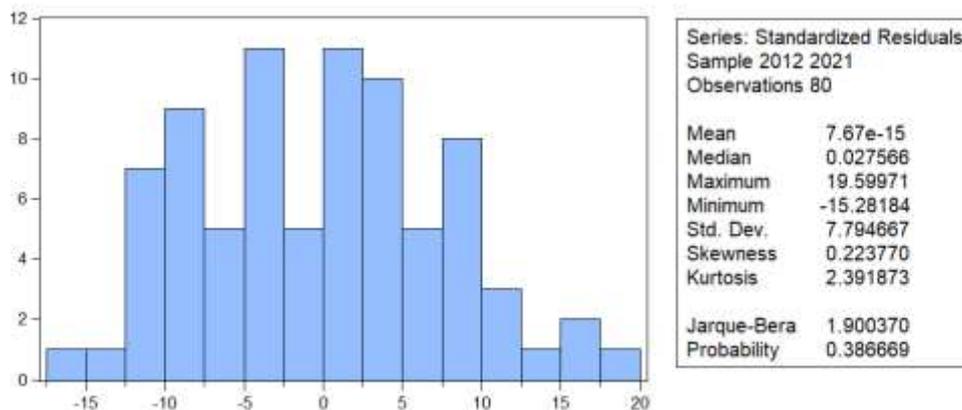
Sumber: Output Eviews 9 (diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan hasil pengolahan analisis regresi data panel model *random effect* yang tersaji pada tabel 6 dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$RKKD = -29.31222 + 2.393707PADit + 0.118233BMit + Wit$$

Persamaan tersebut dapat diartikan, jika derajat kontribusi PAD dan rasio efisiensi belanja modal sama dengan nol, maka nilai dari rasio kemandirian keuangan daerah akan sebesar -29,31222, jika nilai derajat kontribusi PAD bertambah satu satuan, sedangkan nilai variabel lainnya di anggap konstan, maka nilai rasio kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat sebesar 2,393707 dan jika nilai rasio efisiensi belanja modal bertambah satu satuan, sedangkan nilai variabel lainnya dianggap konstan, maka nilai dari rasio kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat sebesar 0,118233.

**Uji Asumsi Klasik**  
**Uji Normalitas**



Sumber: Output Eviews 9 (diolah oleh penulis, 2022)

**Gambar 5 Hasil Uji Normalitas**

Dilihat dari gambar 5, hasil uji normalitas diperoleh nilai *Probability jarque-Bera* sebesar 0,386669 lebih besar dari dari taraf signifikansi  $\alpha$  5% ( $0,386669 > 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan untuk riset ini terdistribusi normal.

**Uji Multikolinearitas**

**Tabel 7 Hasil Uji Multikolinearitas**

	X1	X2
X1	1.000000	-0.225993
X2	-0.225993	1.000000

Sumber: Output Eviews 9 (diolah oleh penulis, 2022)

Dilihat dari tabel 7, yang menunjukkan hasil analisis derajat kontribusi PAD (X1) dan rasio efisiensi belanja Modal (X2) berturut-turut adalah -0,225993. Nilai koefisien korelasi lebih kecil dari 0,9 artinya tidak terdapat korelasi antara variabel independen satu dengan variabel independen lainnya. Maka bisa disimpulkan tidak terjadinya masalah multikolinearitas pada model regresi yang digunakan untuk riset ini.

**Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 8 Hasil Uji White**

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	0.905046	Prob. F(5,74)	0.4825
Obs*R-squared	4.610219	Prob. Chi-Square(5)	0.4653
Scaled explained SS	3.156358	Prob. Chi-Square(5)	0.6759

Sumber: Output Eviews 9 (diolah oleh penulis, 2022)

Dilihat dari tabel 8, hasil uji *white* diperoleh nilai *Obs\*R-Squared* sebesar 4,610219 dan nilai *Prob. Chi-Square* sebesar 0,4653 lebih besar dari taraf signifikansi  $\alpha$  5% , maka



dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan dalam riset ini.

### Uji Hipotesis

#### Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Weighted Statistics	
R-squared	0.890509
Adjusted R-squared	0.887665

Sumber: Output Eviews 9 (diolah oleh penulis, 2022)

Dilihat dari tabel 9, hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai *R-Squared* sebesar 0,890509. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh derajat kontribusi PAD dan rasio efisiensi belanja modal terhadap rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 0,890509 atau 89,05%, dan sisanya sebesar 0,109491 atau 10,95% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam riset.

#### Uji Parsial (Uji t)

**Tabel 10 Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-29.31222	4.196323	-6.985217	0.0000
X1	2.393707	0.096022	24.92866	0.0000
X2	0.118233	0.018096	6.533730	0.0000

Sumber: Output Eviews 9 (diolah oleh penulis, 2022)

Dilihat dari tabel 10, hasil uji parsial pada variabel derajat kontribusi PAD (X1) diperoleh nilai probabilitas 0,0000 lebih kecil dari tingkat  $\alpha = 0.05$  ( $0,0000 < 0,05$ ) dan nilai t-hitung  $>$  t-tabel yaitu  $24,92866 > 1,99125$  maka H1 (hipotesis pertama) diterima, yang berarti variabel derajat kontribusi PAD secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah. Dan pada variabel rasio efisiensi belanja modal (X2) diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari tingkat  $\alpha = 0.05$  ( $0,0000 < 0,05$ ) dan nilai t-hitung  $>$  t-tabel yaitu  $6,533730 > 1,99125$  maka H2 (hipotesis kedua) diterima, yang berarti variabel rasio efisiensi belanja modal secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah.

## Uji Simultan (Uji f)

**Tabel 11 Hasil Uji Simultan (Uji f)**

Weighted Statistics	
F-statistic	313.1270
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Output Eviews 9 (diolah oleh penulis, 2022)

Dilihat dari tabel 11, hasil uji simultan memperoleh nilai *f-statistic* sebesar 313,1270 dan nilai *prob(F-statistic)* sebesar 0,000000,  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  ( $313,1270 > 3,12$ ) dan nilai  $\text{prob}(f\text{-statistic}) < 0,05$  ( $0,000000 < 0,05$ ) maka  $H_3$  (hipotesis ketiga) diterima, yang berarti variabel derajat kontribusi PAD dan rasio efisiensi belanja modal secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah.

## Pembahasan

### **Pengaruh derajat kontribusi PAD terhadap rasio kemandirian keuangan daerah**

Dari pengujian hipotesis secara parsial yang telah dilakukan hasilnya membuktikan bahwa derajat kontribusi PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kab/Kota di Provinsi Banten tahun 2012-2021. Derajat kontribusi PAD memiliki nilai koefisien sebesar 2,393707 yang berarti apabila derajat kontribusi PAD mengalami kenaikan sebesar satu satuan dan nilai variabel lainnya konstan maka variabel rasio kemandirian keuangan daerah akan meningkat sebesar 2,393707. Jadi ada hubungan positif antara derajat kontribusi PAD dengan rasio kemandirian keuangan daerah dan setiap terjadi kenaikan pada derajat kontribusi PAD akan mengakibatkan peningkatan pada rasio kemandirian keuangan daerah dan begitu pula sebaliknya. Riset ini searah dengan riset Setiawan, dkk (2021) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

### **Pengaruh rasio efisiensi belanja modal terhadap rasio kemandirian keuangan daerah**

Dari pengujian hipotesis secara parsial yang telah dilakukan hasilnya membuktikan bahwa rasio efisiensi belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kab/Kota di Provinsi Banten tahun 2012-2021. Rasio efisiensi belanja modal memiliki nilai koefisien sebesar 0,118233 yang berarti apabila rasio efisiensi belanja modal mengalami kenaikan sebesar satu satuan dan nilai variabel lainnya konstan maka variabel rasio kemandirian keuangan daerah akan meningkat sebesar 0,118233. Jadi ada hubungan positif antara rasio efisiensi belanja modal dengan rasio kemandirian keuangan daerah dan setiap terjadi kenaikan pada rasio efisiensi belanja modal akan mengakibatkan peningkatan pada rasio kemandirian keuangan daerah dan begitu pula sebaliknya. Riset ini bertentangan dengan riset Affifah dan Rahayu (2021) yang mengatakan bahwa belanja modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Akan tetapi riset ini sejalan dengan riset Defitri (2020) yang mengatakan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, namun pada riset Defitri (2020) belanja modal berpengaruh negatif sedangkan pada riset ini belanja modal berpengaruh positif.

## **Pengaruh derajat kontribusi PAD dan rasio eferiensi belanja modal terhadap rasio kemandirian keuangan daerah**

Dari hasil pengujian hipotesis secara simultan yang telah dilakukan hasilnya membuktikan bahwa derajat kontribusi PAD dan rasio efisiensi belanja modal secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kab/Kota di Provinsi Banten tahun 2012-2021. Nilai *R-Squared* sebesar 0,890509 memiliki arti bahwa pengaruh variabel derajat kontribusi PAD dan rasio efisiensi belanja modal terhadap rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 89,05%, dan selebihnya sebesar 10,95% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam riset. Riset ini sejalan dengan riset Malau dan Simarmata (2020) yang mengatakan bahwa PAD dan belanja modal mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

### **E. KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat di tarik dari riset ini yaitu bahwa hasil riset yang telah dilakukan dapat membuktikan derajat kontribusi PAD dan rasio efisiensi belanja modal memiliki pengaruh terhadap rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 89,05% dan sisanya sebesar 10,95% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam riset ini. Hasil uji parsial membuktikan bahwa derajat kontribusi PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio efisiensi belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah. Hasil uji simultan membuktikan bahwa derajat kontribusi PAD dan rasio efisiensi belanja modal secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akhmad. (2019). Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pustaka AQ.
- Djanegara, M. S. (2017). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Teori, Praktik dan Permasalahan. Bogor: Kesatuan Press.
- Ghazali, I. (2017). Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi Dengan Eviews-10. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husain, T., & Sunardi, N. (2020). Firm's Value Prediction Based on Profitability Ratios and Dividend Policy. *Finance & Economics Review*, 2(2), 13-26.
- Kadim, A., & Sunardi, N. (2022). Financial Management System (QRIS) based on UTAUT Model Approach in Jabodetabek. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 6(1).
- Kadim, A., Sunardi, N & Husain, T. (2020). The modeling firm's value based on financial ratios, intellectual capital and dividend policy. *Accounting*, 6(5), 859-870.
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Patarai, M. I. (2017). Kinerja Keuangan Daerah. Makassar: De La Macca.
- Putra, W. (2018). Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. Depok: Rajawali.
- Soentoro, A. (2015). Cara Mudah Belajar Metodologi Penelitian Dengan Aplikasi Statistika. Depok: PT Taramedia Bakti Persada.
- Sunardi, N. (2022). Liquidity and Asset Growth on Telecommunications Companies Value. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)*, 5(3), 299-307.



- Winarno, W., W. (2015). Analisis Ekonometrika dan Statistika Dengan Eviews. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Defitri, S. Y. (2020). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 19(2), 107–119. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i2.476>
- Malau, E. I., & Simarmata, E. P. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, 3(2), 332–337. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v3i2.196>
- Nugraha, Y. N. (2019). Ketergantungan Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Diakses pada*, 28.
- Riyanti, A. E., Frida, A., & Julia, A. (2021). Pengaruh kemandirian Fisikal, IPM dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Wilayah di Provinsi Banten Tahun 2013-2019. *Prosiding Ilmu Ekonomi; Vol 7, No 1, Prosiding Ilmu Ekonomi (Februari, 2021)*, 7(1), 54–60.  
<http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/25994/pdf>
- Setiawan, P., Widiyanti, R., Siregar, L. M., Nurhaida, N., & Oktavia, E. (2021). Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016. *Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 7(1), 44–53. <https://doi.org/10.31869/me.v7i1.2536>
- Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

